

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin M. 2020. *Membumikan Pengawas Pemilu*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Social*. Bandung: Alfabeta,
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu Di Dunia “*Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*”. Jakarta : CV. Net Communication
- Djohan, Djohermasyah, dkk. 2016. *Cet. 20; ED. 1, Sitem Kepartaian dan Pemilu*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Edwin, Nazar. Diambil dari repository.unja.ac.id. <https://repository.unja.ac.id/23452/>
- Efriza , Yoyoh Rohaniah an. *Sistem Politik Indonesia*. Jawa Timur : Intrans Publisng
- Fatah, Abdoel. 2008. *Pembangunan Karakter Unggul*. Jakarta: Arga
- Hafidz, Masykurudin, dkk. *Bahan Bacaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif: Untuk Tingkat Dasar*. Ttp: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Harahap, Syahrin. 2014. *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*. Jakarta: Grup Media Prenada.
- Hazlitt, Henry. 1964. *Dasar-dasar Moralitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat Saini, Nur. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press,

<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2353>

Kotten, Natsir B. 2020. *Bawaslu Tidak Lagi Ompong*. Malang: Media Nusa Creative.

Magnis, Franz. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius Media.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nafisah, Khudrotun. 2019. *Buku Saku Santri Mengawasi Pemilu 2019*. Jombang: Bawaslu Kabupaten Jombang.

Patton, Michael Quinn. 1987. *Triangulasi*. Dalam Moleong (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan ke-29*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Purwanto, Anim. 2022. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Dan Penelitian Indonesia,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017, pasal 13

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017, pasal 3

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017, pasal 2

Pradana, J. 2019. *Sepenggal Perjalanan Kewenangan Bawaslu*. Diambil kembali dari bawaslu.go.id: [https://bawaslu.go.id/id/berita/sepenggal-perjalanan-](https://bawaslu.go.id/id/berita/sepenggal-perjalanan-kewenangan-bawaslu)

[kewenangan-bawaslu](https://bawaslu.go.id/id/berita/sepenggal-perjalanan-kewenangan-bawaslu)

Salim, dkk. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana

- Santoso, Topo, dkk. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Saufi, Ahmad, dkk. 2020. Diambil dari Journal. Ummat.ac.id.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2400>
- Siagian, Sondang, 1996. *Etika Bisnis*,
- Silaban, F. 2014. *Bawaslu Akan Bangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif*.
Diambil dari bawaslu.go.id: <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-akan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif>
- Sitorus, Masganti. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: IAIN PRESS.
- Sofiyatul Millah, Nia, dkk. Diambil dari journal.upy.ac.id.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1583>
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suswanto, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.
- Suswanto, Gunawan, dkk. 2020. *Modul sekolah kader pengawas pemilu partisipatif tahun 2020*. Surabaya: BAWASLU Prov Jawa Timur.
- Tampubolon, Batara AP, dkk. *Sekolah Kader Pengawas Partisipatif: untuk Tingkat Menengah*. Ttp: BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA.
- Thompson ,Brian. 1977. *Textbook a Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3*.
London : Blackstone PressLtd.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (8)

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 5

Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 13

Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 89 Ayat (2)

Zaina, Veithzal Rivai 1 dkk. 2017. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*.

Jakarta:Rajawali Pers.

Al Kindi, Mohamad Djazman. 1989. *Muhammadiyah Peran Kader Dan Pembinaannya*.

Surakarta: Muhammadiyah Universty Perss.

Arifin, Muhammad. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Cet. III. Jakarta: Bumi Aksara.

Abror, muchlas 2010. *Muhammadiyah persamaan dan kebersamaan*, Yogyakarta :

Gama Media

Rivai, H. Veithzal dan Arivin, H. Arviyan. 2009. *Islamic Leadership, Membangun*

Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual. Jakarta : Bumi Aksara.

Lampiran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) BAWASLU di Deli Serdang.

Catatan Wawancara Sama Kepala Sekolah SKPP

Identitas Informan

Nama Informan : Muhammad Ali Sitorus M.A

Jabatan : Kepala Sekolah

Hari / Tanggal : Kamis

Waktu : 14.00 – 14.45

1. Apa itu Sekolah Kader pengawas partisipatif?

Jawabannya :

Sekolah kader pengawas partisipatif ini ialah sekolah yang dibangun BAWASLU yang mana ini termasuk program kerja bawaslu dengan masyarakat untuk melek terhadap politik dan ikut berperan dalam politik dan pemilu khususnya untuk membantu kinerja BAWASLU yang saat ini kurang efektif karena kondisi anggota BAWASLU yang terbilang sedikit. Jadi sekolah ini dibuat untuk nantinya masyarakat yang ikut berperan bisa menjadi kader kader pengawas partisipatif yang efektif dan tepat guna karena telah mendapat didikan langsung oleh bawaslu itu sendiri.

2. Apa latar belakang yang membuat munculnya skpp di Deli Serdang ini pak?

Jawabannya :

yang melatar belakangi sekolah kader ini diciptakan dari bawaslu RI hingga ke bawaslu kabupaten kota ialah meningkatkan partisipasi masyarakat sadar tentang apa itu politik dan melek terhadap perpolitikan dikawasannya maupun di Indonesia. Dan terbentuknya skpp ini juga agar masyarakat itu tepat guna dan tepat sasaran untuk turut andil dalam ikut meramalkan pesta pemilu, penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

3. Kapan skpp ini mulai diadakan di kabupaten kota khususnya di Deli Serdang?

Jawabannya :

Sekolah kader pengawas partisipatif mulai diadakan di kabupaten kota khususnya di Deli Serdang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang mana dulu berkouta sangat sedikit, namun semangkin majunya tahun perhatian masyarakatpu turut adil dalam skpp sehingga koutanya meningkat dan saat ini pun ingin masuk ke skolahnya butuh mengikuti penyeleksian dari syarat yang telah di tetapkan pusat.

4. Apa tujuan dan manfaat skpp ini Deli Serdang khususnya?

Jawabannya :

Dalam setiap kegiatan dibuat apa lagi mendirikan sekolah tentulah mempunyai tujuan khusus didalamnya yakni, yang pertama itu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu, lalu yang kedua untuk menjadi sarana pendidikan politik yang tepat sasaran, yang ke tiga menciptakan kader pengawasan yang tepat guna dan tepat sasaran yang mana ini dimaksudkan apa itu sih point penting dari tepat guna dan sasarannya? Ya jawabannya kaum muda yang bila mana kaum muda yang diarahkan untuk mengiikutinya tentu kaum muda pula yang di utamakan untuk menyosong kebenaran dan kelurusan perpolitikan di kawasannya sehingga kaum mudanya itu kreatif dalam berpoltik untuk menyuarakan dan menciptakan politik yang adil.

5. Apa yang diharapkan dari jangka panjang dan pendek skpp ini diadakan?

Jawaban :

Yang diharap jangka pendeknya tentu mampu menjadi pemilu dan bergerak menjadi pelopor pengawasan langsung terjun ke kawasan masyarakat, sehingga menjadi partisipan dalam pemilu di daerah masing masing. Dan jangka panjangnya yaitu menjadi rollmodel nantinya atau contoh di masyarakat untuk melaporkan kecurangan dalam pemilu dan memberikan penyuluhan pemilu kepada orang yang awam di daerahnya yang buta akan politik atau pemilu yang mana nantinya ilmu - ilmu mereka disekolah bisa sampai ke masyarakat. Lalu menjadi corong perubahan untuk menjadi penyelenggara pemilu baik itu di Komisi Pemilihan Umum (kpu),Badan pengawasan Pemilu (BAWASLU), Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan juga sudah terlatih menjadi penyelenggara pemilu baik di nasional maupun internasional.

6. Apa peran SKPP bagi BAWASLU dan masyarakat?

Jawabannya :

Peran SKPP khususnya bagi bawaslu dan masyarakat sih mampu mencegah kecurangan pemilu dan melaporkan kecurangan pemilu di daerah kewasannya masing masing. Adanya pengawasan di daerah masing masing agar bergerak roda pemilu dan perpolitikan di Deli Serdang dengan baik.

7. Apa faktor penghambat SKPP ini dia adakan?

Jawabanny :

Sampai saat ini untuk hambatan belum ada karena kita selalu jalankan SOP yang sudah ada dengan baik langsung yang diturunkan oleh pusat, baik itu pengretrutan siswa, pemilihan fasilitator atau narasumber yang diundang.

8. Apakah SKPP ini selalu diadakan tiap tahunnya mengingat adanya perubahan atau pergantian anggota BAWASLU?

Jawabannya :

Untuk sekolah kader ini sih program dari anggota bawaslu yang sebelumnya yang didirikannya pun masihterbilang baru beberapa tahun namun untuk itu setelah adanya perubahan anggota bawaslu pusat pun sampai tingkat kabupaten sekolah ini tetap akan langsung diadakan, karena mengingat sekolah ini telah ditetapkan menjadi program kerja BAWASLU.

9. Masalah apa saja yg trjadi sehingga perlu diadakan skpp ini pak?

Jawabannya :

Masalah yang terjadi di bawaslu sehingga munculnya skpp menjadi program baru bawaslu ialah mengingat anggota bawaslu yang sedikit dari tingkat pusat hingga kecamatan itu tak bisa menutupi kinerja yang baik jadi adanya program baru ini membuat sekolah kader untuk membantu kinerja bawaslu semangkin baik dalam pengawasan perpemiluan di Indonesia. Dan program ini pun menjadi sarana pendidikan dan

mendekatkan diri antara bawaslu dengan masyarakat unruk menciptakan partisipasi masyarakat terhadap pemilu ddan pengawasan pemilu untuk mencapai tujuan pemilu yang jujur benar dan adil.\

10. Berapa kisaran biaya yang di keluarkan untuk mengadakan skpp deli serdang?

Jawabannya :

Kalau soal biaya yang di keluarkan kita tidak mengetahuinya karena semua biaya dari mulai transport, kegiatan dari awal sampai akhir, uang saku, uang operasional dan lainnya itu udah ada langsung ditetapkan di tingkat pusat dan poksi yang mengetahuinya itu di pihak sekjen pusat dan provinsi. Untuk pihak kabupaten itu sendiri cuan mengarahkan dan menjalankan yang diutus pihak pusat dan provinsi.

11. Apakah ada hubungannya atau dalam mata pelajarannya skpp itu mengenai politik islam pak?

Jawaban :

Sebenarnya sih dari bahan materi silabus yang diajarkan di SKPP itu jugak ada corak perpolitikan islam di wantahkan dalamnya dan pelajarannya pun semua jugak ada kesamaan corak keislaman dalam berpolitik. Cuman kan kita ramu semua pelajarannya agar bersifat nasionalis dan umum jadi keramuan tersebut tidaklah dibilang ini corak politik islam. namun didalam pelajaran intinya pun seperti memilih pemimpin atau ciri ciri seorang pemimpin yang baik dalam islam, dalam memilih dan menjalankan pemimpinan harus benar jujur dan adil itu juga kan termasuk corak politik islam dan dalam pengawasan partisipatif juga diajarkan mengambil keputusan atau memutuskan dengan ccara musyawarah atau pengambilan mufakat dan pleno itupun juga di pelajari di politik islam. jadi semuanya dalam inti pelajaran SKPP juga menyangkut pelajaran politik islam di dalamnya bahkan dalam menyampaikan sesuatupun di SKPP juga diajarkan menyampaikan itu harus menggunakan retorika yang benar dan mudah di mengerti sehingga apa yang di sampaikan tepat guna dan sasaran. Hal inipun juga menjadi cdorak politik islam dalam hal berpidato ataupn berdakawah.

12. Apa hasil yang udah dilakukan siswa SKPP dan alumni SKPP terhadap BAWASLU dan masyarakat

Jawaban :

Sampai saat ini dari tahun 2019 alumini pertama hingga sekarang rencana tindak lanjut mereka yang sudah mereka buat ya dengan mereka telah melakukan penyuluhan ke masyarakat, ke desa desa ataupun ke kaum muda melenial di tongkrongan adari teman sejawat, orang sekitar maupun dari keluarga. Lalu merreka membuat seminar atau talkshow tentang pemilu, pengawasan partisipatif dan politik di Indonesia. Membangun komunitas komuniatas pengawas partisipatif dan komunitas kaum muda melek politik. Dan baru baru ini mereka melakukan kolaborasi terhadap kegiatan jamboree remaja masjid. Namun untuk itu ada harapann besar yang kami harapkan denngan mereka membuata kampung politik atau kampung pengawasan politik yang sampai saat ini belum terjadi namun ya itu diharapkan bisa terwujud nantinya.

13. Bagaimana penanganan biaya bila siswa dan alumni SKPP buat kegiatan, dana yang di dapat dari mana? Apakah dari bawaslu yang memfasilitasi atau mereka sendiri yang mencari dana?

Jawaban :

Untuk soal pendanaan mereka buat kegiatan, BAWASLU sendiri tidak bisa turut andil mendanai karena mengingat pendanaa bawaslu ini anggarannya tertulis dan harus tepat sasaran degan program bawaslu nantinya yang mana selalu dilaporkan setiap BAWASLU melakukan kegiatan. Sedangkan kegiatan SKPP ini kan lahir sendiri bukan termasuk kegiatan BAWASLU kecuali bawaslu melakukan kegiatan partisipataif BAWASLU baru bisa anak anak SKPP ini dilibatkan. Jadi intinya BAWASLU hanya mendanai saat sekolah saja untuk rencana tindak lanjutnya bawaslu hanya bisa mendukung dan mensetujui kegiatan mereka itu saja. Untuk dana sih mereka bisa menerapkan atau menampilkan ilmu ilmu mereka yang kami ajarkan untuk mencari dana tersebut, karena dalam program pembelajaran SKPP pun mereka jugak diajarkan menjadi

leadership, kesukarelaan dan kerelawanan jadi tentu mereka bisa mencari dana tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Catatan Wawancara Dengan Fasilitator Dan Narasumber SKPP

Identitas Informan

Nama Informan : Dr. Aminuddin, S.Sos. M.A
 Jabatan : Fasilitator dan Narasumber
 Hari / Tanggal : Kamis
 Waktu : 15.00 – 16.00

1. Apa itu sekolah kader pengawas partisipatif ?

Jawabannya :

Sekolah kader pengawas partisipatif ini sekolah yang dibuat bawaslu dengan campur tangan masyarakat yang mana nantinya masyarakat membantu kinerja bawaslu menjadi seorang kader pengawas partisipatif yang bersifat kerelawanan serta kesukarelaan menjadi perpanjangan tangan bawaslu kepada masyarakat.

2. Pentingkah Sekolah kader pengawas partisipatif ini dibuat?

Jawabannya :

Sekolah kader pengawas partisipatif ini sangat penting tentunya dibangun oleh BAWASLU, karena selain dapat membantu kinerja BAWASLU sebagai kader pengawas partisipatif. Sekolah ini juga tentunya membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik yang mana nantinya masyarakat bisa ikut berperan dalam politik, demokrasi dan pemilu sehingga masyarakat tentunya bisa melek terhadap politik dan tanggap terhadap kecurangan politik yang terjadi di masyarakat.

3. Apa saja nilai nilai yang ditanamkan dan di pelajari seorang siswa sekolah kader pengawas partisipatif?

Jawabannya :

Untuk nilai nilai yang ditanamkan kepada seorang siswa sekolah kader ini tentunya nilai nilai karakter dan politik yang menjunjung tinggi keadilan kejujuran dan kebenaran serta untuk nilai pengawasan khususnya seorang kader harus mempunyai sifat etika dan moral yang baik dan sifat kerelawana yang tinggi.

4. Apakah ada penerapan pendidikan karakter termasuk dalam kurikulum belajar SKPP ?

Jawabannya :

Pendidikan karakter tentu salah satu termasuk mata pelajaran yang di pelajari siswa skpp, bahkan ini mata pelajaran utama dan inti yang harus dimiliki seorang kader pengawas partisipatif nantinya. Karena seorang pengawas partisipatif harus memiliki karakter yang baik.

5. Apa tujuan menerapkan pendidikan karakter dalam sekolah kader pengawas partisipatif di pelajari?

Jawabannya :

Tujuan dari menerapkan pendidikan berkarakter dalam sekolah kader ini ialah menjadi seorang pengawas partisipatif tentulah harus

mempunyai karakter yang baik. Karena seorang kader pengawas partisipatif bukan hanya dibentuk untuk membantu BAWASLU saja tapi bisa jadi menjadi seorang guru bagi masyarakat awam untuk memberikan penyuluhan ataupun edukasi politik terhadap masyarakat. Dan bisa juga menjadi penyelenggara pemilu atau ikut serta dalam politik nantinya yang menjunjung tinggi asas keadilan, kebenaran dan kejujuran.

6. Apa metode yang digunakan dalam mengajar di SKPP ini?

Jawabannya :

Metode yang digunakan seorang narasumber dan fasilitator dalam sekolah kader pengawas partisipatif ini ialah dengan cara ceramah, curah pendapat, Tanya jawab, diskusi kelompok, simulasi, psikotest, outbond dan studi lapangan.

7. Media dan peralatan apa saja yang digunakan untuk mengajar dalam pembelajaran di SKPP ?

Jawabannya :

Media yang digunakan dalam mengajar siswa sekolah kader tentu menggunakan laptop, materi materi yang telah disiapkan dalam bentuk brosur, power point dan lain lain, lalu LCD, monitor, flipchart dan alat tulis.

8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengajar siswa SKPP?

Jawabannya :

Kendala yang dihadapi dalam mengajar tentunya tidak ada, dikarenakan siswa yang di terima dan masuk dalam sekolah kader ini diseleksi dengan sangat baik dan pastinya siswa siswa yang mempunyai daya belajar dan kemauan yang tinggi untuk mau mengikutinya jadi tidak ada kendala yang dihadapi sama sekali bahkan pembelajaran yang dilakukan pun sangat berjalan kondusif dan sangat aktif.

9. Apakah ada nilai nilai politik islam yang diajari dalam sekolah kader pengawas partisipatif ini?

Jawabannya :

Tentu saja ada nilai nilai keislaman dan politik islam yang dipelajari di pendidikan sekolah kader ini karena semua pendidikan tentu berdasarkan dengan nilai nilai religiusan dalam Bergama dan nilai nilai karakter yang diagama juga sangat membantu siswa untuk dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa, cuman berkenaan ini dengan nasionalis jadi semua nilai keislaman dan nilai dasar politik islam kita ramu menjadi umum dan nasionalis.

10. Menurut narasumber apakah dibutuhkan nilai politik islam bagi seorang pengawas partisipatif?

Jawabannya :

Bagi nantinya siswa atau alumni skpp yang telah menjadi pengawas partisipatif tentu harus menjunjung tinggi nilai nilai pengawasan

yang mana nilai nilai pengawasan ini juga termasuk didalamnya ada nilai politik islam yang mana itu harus berani mengungkapkan kesalahan atau kecurangan dalam pemilu, dan seorang pengawas partisipatif harus jujur dan adil dalam dalam melaporkan kasus – kasus yang terjadi dilapangan serta seorang pengawas partisipatif juga rela menjadi tenaga relawan yang mampu melakukan apapun demi kemaslahatan tanp memperoleh hasil dari kebbaikannya. Dan ini semua juga terangkum dalam nilai dasar politik islam namun masih banyak lagi tentunya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Catatan Wawancara siswa SKPP

Identitas Informan

Nama Informan : Arief Rahman, S.Sos.

Jabatan : Siswa

Hari / Tanggal : Senin

Waktu : 15.00 – 16.00

1. Apa yang anda ketahui tentang Sekolah Kader Pengawas Partisipatif?

Jawabannya :

Sekolah kader pengawas partisipatif itu sekolah yang dibangun pihak bawaslu untuk menciptakan kader kader yang mana nantinya membantu kinerja bawaslu atau sebagai pemanjang tangan bawaslu ke masyarakat yang mana nantinya kader kader ini bisa membantu mengawasi jalannya pemilu dan memberikan edukasi pendidikan politik dan pengawasan politik terhadap masyarakat.

2. Apakah penting Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini dibuat?

Jawabannya :

Tentu saja sangat penting karena selain nantinya kader kader yang dibentuk membantu kinerja bawaslu dalam pengawasan pemilu, sekolah ini juga seperti kerja sama antara bawaslu dengan masyarakat yang mana nantinya masyarakat dapat melihat terbuka jelas jalannya pemilu dengan baik serta masyarakat mendapatkan edukasi politik dan pemilu yang sangat awam kita ketahui

3. Apa pelajaran penting bagi kamu setelah kamu belajar di sekolah kader pengawas partisipatif?

Jawabannya :

Pelajaran penting yang saya dapat dan pelajari setelah bersekolah di SKPP ini ya yang pertama saya dapat mengetahui ilmu politik, demokrasi politik, pembentukan karakter, karakter yang di perlukan seorang pengawasan partisipatif, jiwa kesukarelaan dan tata cara memilih pemimpin dan pemilu yang benar serta melaporkan kecurangan kepemiluan.

4. Sistem pembelajaran apa saja yang digunakan fasilitator dan narasumber saat proses belajar berlangsung?

Jawabannya :

System yang digunakan fasilitator dan narasumber saat belajar ya semua fasilitator tentu menggunakan system yang berbeda beda. Seperti ada yang menggunakan sistem diskusi Lalu jika sitemnya seminar atau talkshow, sistem pembelajaran ruang terbuka, penyuluhan ke masyarakat, meriset dan meneliti lapangan pengawasan serta games dan lain lain.

5. Bagaimana respon siswa saat pembelajaran berlangsung?

Jawabannya :

Respon siswa saat pembelajaran berlangsung tentu sangat bersemangat dan bergembira karena ya sistematis yang digunakan saat belajar itu sangat santai tenang dan menggembirakan.

6. Apakah anda menangkap pesan nilai nilai karakter yang disampaikan guru dalam belajar?

Jawabannya :

Tentu saja saya mendapatkan nilai pesan karakter fasilitator dan narasumber sampaikan karena pesannya dan moral sebuah karakter sangat di kedepankan di sekolah ini karena pendidikan karakter adalah hal yang utama yang diajarkan di sekolah ini sehingga nantinya seorang kader mempunyai nilai guna dan karakter pengawas yang baik.

7. Karakter apa yang di perlukan untuk pengawasan partisipatif ini?

Jawabannya :

Karakter yang harus dimiliki seorang pengawas partisipatif ialah karakter yang mana menjunjung tinggi moral etika serta mempunyai sifat kesukarelaan dan kerelawanan yang nantinya menjadi kunci seorang kader pengawas. Karena seorang kader pengawas ini ia rela membantu dan rela tampil menghadapi masalah kepemiluan dengan maksud menegakkan kejujuran dan keadilan pemilu sehingga ia siap untuk tidak dibayar oleh siapapun.

8. Apa kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran berlangsung?

Jawabannya :

Kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran berlangsung tidak ada, karena semua sudah disusun dan diatur sedemikian rupa dengan sangat baik.

9. Menurut anda apakah ada nilai nilai keislaman atau politik islam didalam kurikulum pembelajaran?

Jawabannya :

Tentu saja ada, karena dalam setiap pembelajaran berlangsung atau ilmu yang diberikan dan dipelajari tentu semua mempunyai nilai keislaman dan nilai politik islam didalamnya. Seperti halnya sifat disiplin, kesukarelaan, kerelawanan, pembentukan karakter yang baik tentu semua telah mereka susun demikian berlandaskan nilai nilai keagamaan dan khususnya dalam keislaman narasumber selalu membawakan budi dan gaya politik Rasulullah yang patut di contoh seperti akhlak Rasulullah, dan gaya pengambilan keputusan Rasulullah dengan cara bermusyawarah.







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Fachrurrozy
Tempat/Tanggal Lahir : Sekip, 03 Juni 2000
Alamat : Jalan Sadar Timur Gg. Istiqomah No. 075 Desa Sekip
Lubuk Pakam
Jenis kelamin : Laki - Laki
Status : Belum menikah

Nama Orang Tua

Ayah : Zulfikar
Ibu : Kartini, S.Pd.I.

Pendidikan

2006-2012 : Sekolah Dasar Negeri 101927 Sekip - Lubuk Pakam
2012-2015 : SMPN 4 Lubuk Pakam
2015-2018 : SMKN 1 Beringin
2018- Sekarang : S-1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Saya menyatakan bahwa daftar riwayat hidup di atas adalah benar dan dapat diperiksa kebenarannya.

Hormat saya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA (Muhammad Fachrurrozy)